

PERMASALAHAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH DI ERA PANDEMI

13

Yulia Indahri

Abstrak

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang dianggap paling mendesak untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Berdasarkan pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tiga bulan terakhir, pemerintah menilai bahwa PJJ masih menjadi pilihan untuk diterapkan di tahun ajaran baru 2020/2021. Tulisan ini mengkaji beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PJJ di masa pandemi. Ada beberapa hal yang masih menjadi permasalahan dalam menjaga kesinambungan pendidikan nasional. Infrastruktur teknologi dan kurikulum yang rasional, adaptif dan sesuai dengan kondisi terkini selalu menjadi catatan DPR dalam setiap diskusi, tidak hanya ketika pandemi Covid-19, tetapi juga setiap kali diskusi tentang membangun pendidikan nasional. Kurikulum inilah yang menjadi pegangan guru ketika terjadi pergeseran peran guru sebagai fasilitator. Perlu terus diingat bahwa guru masih membutuhkan pendampingan, pelatihan, dan pengarahan teknis untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan. DPR RI dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan mendorong disusunnya peta jalan pendidikan yang mampu menjawab permasalahan tersebut.

Pendahuluan

Saat ini, era kenormalan baru telah dimulai di beberapa daerah. Pendidikan menjadi salah satu sektor yang dianggap paling mendesak untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi, Presiden memutuskan untuk menunda pelaksanaan kenormalan baru di dunia pendidikan. Selanjutnya pada 15 Juni 2020, Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan telah mengumumkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19 (Media Indonesia, 16 Juni 2020).

Data 15 Juni 2020 memperlihatkan bahwa panduan



tersebut akan memengaruhi model pembelajaran di Indonesia pada saat tahun ajaran baru 2020/2021 dimulai pada pertengahan Juli mendatang. Tahun ajaran baru yang dimulai dengan 94% siswa yang berada di zona kuning, oranye, dan merah yang tersebar di 429 kabupaten/kota. Sementara siswa yang berada di zona hijau hanya berkisar 6% (Republika, 18 Juni 2020). Berdasarkan pelaksanaan PJJ tiga bulan terakhir, pemerintah menilai bahwa PJJ masih menjadi model pembelajaran yang dipilih berdasarkan panduan di atas. Tulisan ini mengkaji beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PJJ di masa pandemi. Pada kenyataannya masih banyak pekerjaan rumah yang menjadi tanggung jawab bersama dalam menjaga kesinambungan pendidikan nasional.

Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh

Hingga 16 Juni 2020, UNESCO mencatat bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan hampir 1,1 miliar siswa yang belajar di 123 negara tidak dapat bersekolah/kuliah seperti sebelumnya. Angka ini merupakan 62,3% dari jumlah mereka yang belajar di seluruh penjuru dunia, sebagai dampak penutupan institusi pendidikan (en.unesco.org, 16 Juni 2020). UNESCO juga mencatat bahwa dampak dari pembukaan sekolah telah dirasakan oleh 94,6 juta siswa. Jumlah siswa yang mulai merasakan proses belajar di sekolah terus bertambah sejak 18 Mei 2020 (30,7 juta siswa) seiring dengan pelonggaran kebijakan karantina lokal maupun nasional di sejumlah negara (Kompas, 11 Juni 2020).

Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19) yang diperkuat dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal No. 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah (BDR) dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 masih berlaku pada saat tahun ajaran baru dimulai. Guru memberikan materi PJJ dengan memperhatikan pedoman BDR, yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat Covid-19. Guru dan tenaga kependidikan melaksanakan piket ketika PJJ dijalankan oleh siswa dan orang tua di rumah. Sedikitnya hanya satu guru dan seorang wali kelas yang piket setiap hari belajar, dan durasinya pun tidak panjang, hanya 2-3 jam berada di sekolah (Gatra, 11-17 Juni 2020).

Panduan berdasarkan SKB Empat Menteri yang baru disahkan berisi mekanisme pelaksanaan pembukaan sekolah di masa pandemi ketika pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 tetap akan dimulai pada 13 Juli 2020. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sekolah yang berkeinginan melaksanakan pembelajaran tatap muka. *Pertama*, sekolah berada di zona hijau. *Kedua*, pemerintah daerah dan Kantor Wilayah/Kantor Kementerian Agama memberikan izin. *Ketiga*, satuan pendidikan sudah memenuhi semua daftar protokol kesehatan dan siap melakukan pembelajaran tatap muka. Terakhir, syarat *keempat*, orang tua/wali murid menyetujui anaknya melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Apabila

salah satu dari empat syarat itu tidak terpenuhi, maka peserta didik melanjutkan BDR atau PJJ secara penuh (Kompas, 16 Juni 2020).

Keputusan membuka sekolah dan memulai aktivitas belajar secara tatap muka diambil sesuai dengan kondisi penambahan jumlah kasus positif Covid-19 secara harian yang mulai melandai di sejumlah negara. Di Asia, pembukaan sekolah telah dilakukan di Vietnam, Jepang, dan Korea Selatan. Di Eropa kebijakan serupa diterapkan di Perancis, Belarusia, Austria, Kroasia, dan Swiss. Sementara di Benua Afrika, kebijakan pembukaan sekolah mulai dilakukan oleh Niger dan Burundi. Seperti halnya praktik global, pembukaan sekolah di Indonesia memang baru dapat dilakukan setelah melalui serangkaian persyaratan ketat (Kompas, 11 Juni 2020).

Hasil evaluasi pelaksanaan PJJ yang telah berjalan tiga bulan lebih telah dijadikan dasar dalam menentukan bahwa pola PJJ masih menjadi pilihan terbaik walaupun ada kekurangan. Pilihan ini juga sesuai dengan aspirasi mayoritas orang tua siswa dan sejumlah asosiasi guru, seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu), Forum Guru Muhammadiyah (FGM), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), dan Ikatan Guru Indonesia (IGI) (Media Indonesia, 12 Juni 2020). Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) juga merekomendasikan agar PJJ dilanjutkan hingga akhir 2020 mengingat kerentanan siswa, khususnya siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Kompas, 10 Juni 2020).

Ada tiga hal harus diperhatikan dalam menjawab tantangan model

pembelajaran di masa yang akan datang dengan melihat evaluasi pelaksanaan PJJ, yaitu infrastruktur, kurikulum, dan peningkatan kapasitas guru.

Infrastruktur Teknologi

Berdasarkan hasil evaluasi Kemendikbud mengenai kegiatan PJJ selama tiga bulan terakhir, hanya 51% kegiatan PJJ yang berjalan efektif. Masih ada permasalahan karena sejumlah siswa tidak memiliki akses teknologi, keterbatasan alat/gawai, jaringan internet, dan aplikasi/media pembelajaran. Untuk internet, permasalahan terjadi karena akses jaringan internet yang tersedia tidak merata, antara daerah maju di perkotaan dan daerah pinggiran.

Kendala akses teknologi sebenarnya juga dapat dikoordinasikan dengan pemerintah daerah (pemda). Pemda dapat bekerja sama dengan televisi dan radio lokal, atau juga radio komunitas. Praktik tiga bulan terakhir pelaksanaan PJJ tidak harus selalu terhubung secara *online*. Sudah diupayakan penyesuaian terhadap kondisi, situasi, fasilitas, dan kapabilitas satuan pendidikan atau sekolah masing-masing. Bahkan di kota besar pun, ada sekolah yang mampu karena cukup fasilitasnya. Sementara di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal), ada sekolah yang tidak pernah terhubung dengan listrik, apalagi internet. Seperti contoh di Provinsi Papua, dari 608.000 siswa, yang tidak terlayani pembelajaran *online* mencapai 54% (Media Indonesia, 8 Juni 2020).

Mengingat arti penting infrastruktur dalam mengakses PJJ, pemerintah sudah sewajarnya segera mengatasi kesenjangan digital. Ada

usulan agar Indonesia mempunyai satelit khusus pendidikan untuk menghindari *blank spot* dan *blank pocket* (Hamad, 2020). Walaupun sekolah sudah berupaya untuk menyasiasi kondisi yang ada, pemerataan digital, baik secara geografis maupun sosial, akan membantu pemerataan akses pendidikan di masa depan. Sejalan dengan itu, yang tak kalah penting ialah peningkatan literasi digital. Semua pihak perlu diajak untuk mengenali, memproduksi, dan menyebarkan konten yang mendidik, bukan konten negatif yang menyebarkan kebodohan, perpecahan, dan mengganggu mental siswa.

Kurikulum

Selain keterbatasan akses jaringan internet, satu permasalahan lain yang sering dikeluhkan selama pelaksanaan PJJ adalah belum adanya kejelasan kurikulum PJJ yang digunakan selama masa pandemi. Kurikulum juga menjadi salah satu catatan DPR RI yang disampaikan melalui Komisi X dalam berbagai kesempatan rapat kerja dengan kementerian. Terakhir catatan tersebut juga disampaikan pada saat pengumuman dikeluarkannya SKB Empat Menteri. Seharusnya kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang rasional dan adaptif dengan kondisi terkini, kondisi darurat kesehatan, serta tidak terlalu padat konten.

Saat ini, Pusat Kurikulum dan Perbukuan di Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud sedang mempersiapkan opsi penyederhanaan kurikulum. Kurikulum akan berisi kompetensi dasar yang benar-benar diperlukan untuk menyikapi kondisi darurat

pandemi serta fokus pada konten numerasi, literasi, dan pendidikan karakter (Kompas, 17 Juni 2020). Tetapi tidak seperti yang diberitakan di media, penyederhanaan kurikulum ini tidak dilakukan dengan melebur mata pelajaran Agama (Kompas, 20 Juni 2020). Kurikulum yang ada saat ini memang dirasakan cukup banyak dan berat, sehingga masih terus dipilih materi mana yang paling esensial. Sebagai contoh, untuk SD, kompetensi dasar yang awalnya berjumlah 60-an, setelah diidentifikasi ulang dapat disederhanakan menjadi 32 kompetensi (Gatra, 11–17 Juni 2020).

Kapasitas Guru

Menghadapi pandemi, banyak guru yang belum siap dalam literasi digital untuk PJJ. Kompetensi guru dalam penguasaan PJJ dan literasi digital sejak awal memang tidak dipersiapkan untuk menghadapi pandemi. Data Ikatan Guru Indonesia (IGI) mencatat 60% guru memiliki kemampuan sangat buruk dalam penggunaan teknologi informasi saat mengajar (Media Indonesia, 12 Juni 2020).

Guru masih membutuhkan pendampingan, pelatihan, dan pengarahan teknis untuk mempersiapkan diri agar dapat melaksanakan PJJ dengan lebih efektif, dan juga panduan untuk melaksanakan kurikulum atau materi pembelajaran yang adaptif sesuai konteks di masa pandemi (Media Indonesia, 17 Juni 2020). Peran guru juga perlu didefinisikan kembali, karena guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan sudah tidak lagi relevan ketika teknologi bisa menyediakan hal yang sama atau bahkan lebih baik. Guru harus

lebih berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk berkembang dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat.

Sudah ada contoh sejumlah guru yang mengembangkan model pengajaran yang kreatif. Guru di Jawa Tengah, mengajarkan kepada siswa tentang penghargaan atas kehidupan, dengan mengizinkan siswa belajar dari pemilik bengkel sekitar rumah atau sekolah. Guru di NTT berusaha mengoptimalkan aplikasi *WhatsApp* untuk kelas *online*. Penjelasan disampaikan melalui audio dan visual dan sesekali konten diunggah di *YouTube*. Guru di Jawa Barat mengembangkan belajar berbasis proyek dengan aplikasi edukasi, seperti *Google Suite*, *Google Docs*, *Google Spreadsheet*, dan *Google Slides* (Kompas, 10 Juni 2020). Walaupun sudah ada inisiatif dari para guru, tetapi guru tetap membutuhkan panduan penyederhanaan kurikulum yang fleksibel, akomodatif, praktis, dan aplikatif untuk PJJ yang menyenangkan dan berkualitas (Media Indonesia, 17 Juni 2020).

Penutup

Belajar dari pelaksanaan PJJ tiga bulan terakhir, ada tiga permasalahan yang harus diperhatikan dengan terus menjaga sinergi antar pemangku kepentingan, yaitu infrastruktur, kurikulum, dan peningkatan kapasitas guru. Berkoordinasi dengan pemda, pemerintah harus dapat mengatasi kesenjangan digital. Kurikulum secara terpusat perlu disederhanakan setelah dikaji secara matang agar dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam melaksanakan PJJ. Keberadaan kurikulum yang

sudah melalui pengkajian ini akan sangat membantu guru dalam mengembangkan kapasitasnya dengan dukungan penuh dari pemerintah dan pemerintah daerah.

DPR RI melalui peran pengawasannya harus terus mengingatkan pemerintah agar bisa benar-benar mengelola permasalahan seputar pandemi Covid-19 ini tanpa mengesampingkan berbagai pemangku kepentingan. Peran siswa, guru, orang tua, masyarakat, dan pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga kelangsungan pendidikan nasional. Melihat pentingnya peran pemerintah dalam mengoordinasikan berbagai pihak, DPR harus memastikan bahwa peran tersebut dilaksanakan dengan benar-benar mendengarkan berbagai masukan. Sudah saatnya bersama-sama dipikirkan peta jalan pendidikan untuk 10–15 tahun ke depan karena pandemi ini menuntut agar sebagai negara kita harus siap menghadapi perubahan.

Referensi

- “Dilema Membuka Sekolah”, *Kompas*, 10 Juni 2020, hal. 8.
- “Empat Syarat Pembukaan Sekolah Tak Bisa Ditawar”, *Kompas*, 16 Juni 2020, hal. 1.
- “Global Monitoring of School Closure Caused by Covid-19”, diakses di <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse>, pada 16 Juni 2020.
- “Guru-guru Kreatif saat Pandemi Covid-19”, *Kompas*, 10 Juni 2020, hal. 1.
- Hamad, Ibnu. “Satelit Pendidikan”, *Republika*, 22 Juni 2020, hal. 5.
- “Keringanan dan Bantuan untuk Mahasiswa”, *Kompas*, 20 Juni 2020, hal. 5.

- “Keselamatan Siswa Menjadi Prioritas”. *Gatra* No. 33 Tahun XXVI, 11-17 Juni 2020, hal. 46-49.
- “Kurikulum Khusus Disiapkan”, *Kompas*, 17 Juni 2020, hal. 8.
- “Menengok Upaya Pembukaan Sekolah Saat Pandemi”, *Kompas*, 11 Juni 2020, hal. E.
- “Opsi Terbaik Tetap Belajar Jarak Jauh”, *Media Indonesia*, 12 Juni 2020, hal. 2.
- “Panduan Belajar Belum Sentuh Kurikulum”, *Media Indonesia*, 16 Juni 2020, hal. 13.
- “Perlindungan Anak di Era New Normal Harus Optimal”, *Media Indonesia*, 8 Juni 2020, hal. 2.
- “Perubahan Kurikulum Perlu Kajian Matang”, *Kompas*, 20 Juni 2020, hal. 5.
- “Sekolah Diminta Siapkan Dua Skema Pembelajaran”, *Republika*, 18 Juni 2020, hal. 1.
- “Tingkatkan Kualitas Belajar dari Rumah”, *Media Indonesia*, 17 Juni 2020, hal. 2.



Yulia Indahri
yulia.indahri@dpr.go.id

Yulia Indahri, S.Pd., M.A. Menyelesaikan studi S-1 Teknologi Pendidikan di IKIP Jakarta dan magister Development Studies di University of East Anglia, Norwich. Saat ini menjabat sebagai peneliti Studi Masyarakat dan Sosiologi Perkotaan di Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah “Peran Parlemen dalam Penanggulangan Kemiskinan”, “Permasalahan Organisasi Profesi Guru”, serta “Penanggulangan Bencana dan Peran Masyarakat”.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.